



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **KECAMATAN RANAH PESISIR**

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman : <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
Nomor : 800.1.8.2/11/CMT-RP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KECAMATAN RANAH PESISIR
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

CAMAT RANAH PESISIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan, diperlukan upaya terkoordinasi untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Ranah Pesisir sebagai upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Ranah Pesisir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2025 sampai dengan 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak;
- b. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan

perempuan dan anak di wilayah Kecamatan Ranah Pesisir;

- c. Meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui anggaran kecamatan Ranah Pesisir;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : di Balai Selasa
Pada tanggal : 21 Januari 2025

Camat,



Syafrizal, S.Sos.,MAP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19750404 200003 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
TANGGAL : 21 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR
SELATAN PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

NAMA – NAMA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Syafrizal,S.Sos.,MAP	PELINDUNG	Camat
2.	Alkismanto,S.IP	Penasehat	Ninik Mamak
3.	Nursyalma S. Dewi,SH.,M.Hum	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4.	Ny,Hartati Handayani Syafrizal	Pembina	Ketua TP PKK Kecamatan
5.	Yeni Alvia Susanti,S.Pt.MM	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6.	Doni Yusra, ST	Wakil Ketua	TKSK Kecamatan
7.	Asrimal Nong Handra,S.Sos	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
8.	Yanita Trisna Putri,S.KM	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan
9.	Sri Gusnengsih	Bendahara	Masyarakat
10.	Sertu Itrisal Efendi	Anggota	Bhabinkamtibmas
11.	Aipda Jepri Wandu	Anggota	Babinsa
12.	Toni Nasrianto,S.HI	Anggota	Tokoh Agama
13.	Herlan Zendra Dt ,Rajo Medan	Anggota	Tokoh Masyarakat

Camat,



Syafrizal, S.Sos.,MAP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19750404 200003 1 006